

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas di bidang kelautan dan perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti dirumuskan pada table 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan	Belum optimalnya pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan	Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan
2		Masih rendahnya produktivitas tangkap	Produksi garam belum optimal
3		Masih rendahnya produktivitas budidaya	Masih banyaknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan
4		Masih rendahnya produktivitas garam	Kurangnya kesadaran nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan
5		Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan yang masih rendah	Masih terbatasnya luasan eksisting lahan mangrove

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
6			Belum optimalnya produksi perikanan budidaya
7			Masih banyak KUB nelayan yang belum berbadan hukum khususnya berbadan hukum Kemenkumham
8			Volume ikan yang dilelang di TPI belum optimal
9			Belum optimalnya retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas
10			Masih rendahnya kelompok pelaku utama perikanan yang sudah mencapai level pelaku utama perikanan madya
11			Belum optimalnya produksi olahan ikan
12			Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan

Yang menjadi masalah pokok dari pembangunan daerah khususnya sektor kelautan dan perikanan adalah pengembangan nilai tambah dari hasil kelautan dan perikanan. Kabupaten Pati memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang begitu besar dengan pantai sepanjang \pm 60 Km dan tambak seluas \pm 10.329 Ha yang terdapat di sepanjang pesisir serta sumberdaya perikanan air tawar yang semakin berkembang. Namun demikian, potensi yang dimiliki tidak sebanding dengan apa yang didapatkan, sehingga daya saing daerah disektor kelautan dan perikanan baik berupa produk mentah maupun produk olahan masih rendah dibanding sektor lainnya. Hal ini tidak terlepas dari produktivitas di sektor kelautan dan perikanan yang belum bisa optimal dan juga kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan masih sangat rendah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pati

Visi Bupati–Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017-2022 adalah “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik.”

Efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Bidang Kelautan dan Perikanan berkorelasi positif terhadap pencapaian Visi Kepala Daerah terpilih khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi Bupati–Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017-2022 dalam upaya untuk mewujudkan Visinya adalah :

- a. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
- e. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
- f. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
- h. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mendukung dalam pencapaian misi yang ke enam yaitu Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri. Perikanan termasuk salah satu poin penting yang tidak terlepas dari pertanian. Peningkatan produktivitas komoditas perikanan diharapkan mampu untuk menaikkan daya saing daerah dan ikut berperan aktif dalam menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Pati. Dalam hal mendukung pencapaian misi Kepala Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 2 (dua) program unggulan yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dipaparkan pada Tabel 3.1. di atas, dan dikaitkan dengan telaah visi dan misi Bupati terpilih selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor pendukung dan penghambat tersebut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pati

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 6 Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri	Produktivitas di sektor kelautan dan perikanan yang masih rendah baik itu produktivitas tangkap, budidaya maupun garam	Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Banyaknya penduduk kawasan pesisir yang antusias untuk mendapatkan pembinaan pelatihan usaha sektor kelautan dan perikanan
			Kualitas produksi garam masih belum optimal	Peningkatan produksi Garam rakyat melalui pembinaan dan intorduksi teknologi pembuatan garam serta pemberian bantuan sarpras pengolahan garam melalui koperasi garam
			Masih banyaknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan	Terbentuknya Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi sumberdaya kelautan
			Kurangnya kesadaran nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan	Adanya kegiatan patroli laut yang melibatkan lintas sektoral dalam rangka pengawasan dan pembinaan kepada nelayan yang menggunakan alat tangkap nelayan
			Masih terbatasnya luasan eksisting lahan mangrove	Adanya Penanaman mangrove oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat dan pembinaan pelestarian ekosistem mangrove
Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Adanya penyediaan bibit ikan unggul di UPTD Balai benih ikan dan budidaya, adanya sentra ikan nila salin di Kec. Tayu, adanya sosialisasi deteksi dan penanganan hama penyakit ikan dan lingkungan budidaya, adanya pendampingan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya			

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Masih banyak KUB nelayan yang belum berbadan hukum khususnya berbadan hukum Kemenkumham	Dilaksanakannya sosialisasi hukum kenelayanan dan pendampingan kepada kelompok nelayan dari segi kelembagaan serta pemberian bantuan kepada kelompok nelayan yang sudah berbadan hukum
			Pelayanan jasa pelelangan di TPI untuk mengoptimalkan volume ikan yang dilelang masih belum memadai	Pembangunan infrastuktur dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan, pembangunan kolam pelabuhan sebagai sentra industri perikanan tangkap serta penyediaan tenaga maupun sarana pendukung kegiatan pelelangan di TPI
			Belum optimalnya retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas	Pembangunan infrastuktur dan pemeliharaan UPTD Balai Benih dan Budidaya (BBI dan tambak dinas)
		Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan yang masih rendah	Sebagian kelas kelompok pelaku utama perikanan merupakan kelas kelompok pemula	Adanya pemberdayaan penyuluh baik swadaya maupun penyuluh pusat dalam membina kelompok pelaku utama perikanan
			Belum optimalnya produksi olahan ikan	Banyaknya pelaku usaha pengolahan ikan yang berminat untuk mendapatkan pelatihan diversifikasi olahan ikan, mulai bermunculan unit unit pengolahan ikan yang baru, serta adanya gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan (GEMARIKAN)
			Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan	Adanya sosialisasi dan fasilitasi lintas sektoral untuk pengajuan ijin usaha kelautan dan perikanan (SKP, PIRT,)

Dari penjelasan tersebut diatas, Merujuk pada telaah unsur visi misi Bupati terpilih, tantangan isu strategis yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Pati yang Sejahtera dan Pelayanan Publik yang prima adalah Belum optimalnya pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan.

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

A. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dijalankan dengan peneguhan kembali jalan ideologis bangsa. Ideologi itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti (Kedaulatan dalam politik, Berdikari dalam ekonomi, Kepribadian dalam kebudayaan). Dengan demikian, prinsip dasar Trisakti menjadi basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan landasan kebijakan nasional 5 (lima) tahun kedepan, termasuk pembangunan kelautan dan perikanan.

Ideologi TRISAKTI menggambarkan bahwa pembangunan dicapai melalui perwujudan bangsa yang (1) *berdaulat*, yaitu bangsa yang mampu hidup sejajar dan sederajat dengan bangsa lain, hal ini dicapai melalui peningkatan kemampuan berdaya saing; (2) *Mandiri*, yaitu berkurangnya ketergantungan dari sumberdaya luar negeri melalui ketersediaan manusia yang berkualitas dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) secara terpadu dan ramah lingkungan; (3) Berkepribadian dan berkebudayaan, yaitu menyadari jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan bangsa maritim, serta menempatkan maritim sebagai poros kekuatan untuk membangun perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ideologi TRISAKTI dalam RPJMN 2015-2019 juga menggambarkan adanya reorientasi paradigma pembangunan (*paradigm shift*), dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

VISI

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta

bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

MISI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

TUJUAN

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/ impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni **“Kedaulatan”**, **“Keberlanjutan”**, dan **“Kesejahteraan”** dan menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard (BSC)* yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer prespective*, *internal process prespective*, dan *learning and growth prespective*, sebagai berikut:

1. Stakeholders Prespective

Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019.
- b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019.

2. Customer Perspective

Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja:

- a. Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
- b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 31 pulau pada tahun 2019.

Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019.
- b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019.
- c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019.
- d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019.
- e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019.
- f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019.
- g. Persentase peningkatan PNBPN dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019.

3. **Internal Process Perspective**

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP, yakni :

- a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.
- b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.
- c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja:
 - Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019.
 - Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.

4. **Learning and Growth Perspective (input)**

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :

- a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Indeks

Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.

- b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
- c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.
- d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian indikator dalam Matriks Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 khususnya sasaran strategis ketiga yaitu “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yaitu: Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan dan Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk. Pada dasarnya indikator capaian untuk sasaran dari renstra KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan hampir sama bedanya untuk renstra KKP lebih menitikberatkan pada produksi sumberdaya kelautan dan perikanan sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati lebih menitikberatkan pada produktivitasnya.

Capaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang dicapai dalam pelaksanaan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati nantinya akan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

B. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu organisasi pemerintah di Jawa Tengah, dalam rangka melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai visi, yaitu :

“Terwujudnya Sektor Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah yang Tangguh, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.”

Untuk mewujudkan visi yang telah dijelaskan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mempunyai Misi :

Misi ke-1: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan dan pembudidaya ikan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan ketangguhan ekonomi masyarakat pesisir, nelayan dan pembudidaya ikan di Jawa Tengah melalui peningkatan kesejahteraan dalam upaya mendukung kemandirian ekonomi.

Misi ke-2: Penguatan Kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah.

Misi ke-3: Mewujudkan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat Jawa Tengah melalui peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya dalam upaya mendukung kedaulatan pangan.

Misi ke-4: Mewujudkan perbaikan sistem distribusi dan jaminan keamanan pangan yang berasal dari sumberdaya ikan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan upaya perbaikan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian guna memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Misi ke-5: Mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, berdaya saing serta memiliki nilai tambah.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Disamping itu, produk kelautan dan perikanan harus mampu bersaing dengan produk impor dan memperoleh posisi dalam pasar internasional.

Misi ke-6: Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah.

Misi ke-7: Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di 19 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah dalam menunjang pelayanan terhadap nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah dan pemasar produk hasil perikanan yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Jawa Tengah.

Misi ke-8: Mewujudkan peningkatan daya dukung lahan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

Misi ini diarahkan untuk menjaga kelestarian dalam mengeksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan Jawa Tengah dengan tetap memperhatikan kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan

datang serta menghindari rusaknya sumberdaya laut dan perairan umum.

Misi ke-9: Mewujudkan kelembagaan masyarakat pengawas yang berperan dalam kegiatan pengawasan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah.

Berdasarkan rumusan misi yang telah dijelaskan sebelumnya, penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 akan dirinci sebagai berikut:

Tujuan :

1. Meningkatkan kesejahteraan nelayan
2. Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan
3. Meningkatkan kesejahteraan petani garam, taruna pesisir dan wanita pesisir
4. Meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan
5. Meningkatkan perencanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan
6. Meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
7. Meningkatkan ketersediaan protein hewani yang berasal dari sumberdaya ikan
8. Meningkatkan hasil perikanan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan produk hasil perikanan
9. Meningkatkan keterampilan dan keahlian nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar ikan dan penyuluh perikanan
10. Meningkatkan jumlah dan ragam produk olahan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta ekspor produk perikanan
11. Meningkatkan keterampilan dan keahlian nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar ikan dan penyuluh perikanan

12. Meningkatkan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
13. Menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
14. Mencegah kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
15. Meningkatkan peran masyarakat pengawas dlm kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
16. Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakkan peraturan kelautan dan perikanan

Sasaran :

1. Meningkatnya pendapatan nelayan
2. Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan
3. Meningkatnya pendapatan petani garam
4. Meningkatnya pendapatan taruna pesisir
5. Meningkatnya pendapatan wanita pesisir
6. Meningkatnya pengelolaan, dan penyelenggaraan di bidang keuangan, umum kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas
7. Tersedianya perencanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan
8. Meningkatnya produksi perikanan tangkap
9. Meningkatnya produksi perikanan budidaya
10. Meningkatnya konsumsi makan ikan di Jawa Tengah
11. Meningkatnya produk olahan hasil perikanan
12. Meningkatnya volume ekspor produk dan nilai ekspor produk hasil perikanan
13. Terlaksananya pengujian mutu, pengawasan pengolahan hasil perikanan dan sertifikasi mutu yang sudah terakreditasi SNI, ISO/IEC 17025. 2008 dan memiliki analis pengujian dan inspektur mutu yang memiliki standar kompetensi
14. Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan, penyuluh perikanan dan KP3K
15. Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

16. Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana UPTD Bidang Perikanan Budidaya
17. Terlaksananya pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
18. Terlaksananya pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
19. Terlaksananya pembinaan masyarakat pengawas dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
20. Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakkan peraturan kelautan dan perikanan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian indikator dalam Matriks Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yaitu: Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan dan Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk. Pada dasarnya indikator capaian untuk sasaran dari renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kelautan dan Perikanan hampir sama, bedanya untuk renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah lebih menitikberatkan pada produksi sumberdaya kelautan dan perikananannya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati lebih menitikberatkan pada produktivitasnya.

Dari telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dijabarkan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati seperti tertuang dalam tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Ditinjau Dari Sasaran
Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan
Serta Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Strategis Renstra K/L dan Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Sasaran I Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan terbilang masih rendah	Harga pakan ikan terlalu tinggi	Adanya kesadaran pembudidaya ikan untuk mulai membuat pakan ikan mandiri
			Masih kurangnya minat masyarakat mengkonsumsi ikan	Adanya diversifikasi berbagai olahan ikan
			Harga perbekalan dan bahan bakar minyak yang tinggi	Program subsidi BBM untuk nelayan
2	Sasaran II Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM	Tingkat pendidikan SDM belum sesuai untuk tupoksi masing-masing dan persebaran ASN dari Badan Kepegawaian yang kurang merata	Banyaknya lulusan jurusan kelautan dan perikanan yang belum terserap penjangkaran seleksi ASN
3	Sasaran III Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	Masih belum optimalnya produksi sektor kelautan dan perikanan	Faktor cuaca dan alam yang tidak bisa diprediksi paling mendominasi dalam sektor kelautan dan perikanan	Potensi kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang begitu melimpah
4	Sasaran IV Meningkatnya konsumsi makan ikan di Jawa Tengah	Tingkat konsumsi makan ikan Kabupaten Pati terbilang rendah dilihat dari skala nasional	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan	Adanya promosi tentang gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan
5	Sasaran V Terlaksananya pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Kerusakan eksisting lahan mangrove	Penebangan mangrove untuk pembuatan tambak	Penegakan hukum terkait pengrusakan mangrove
6	Sasaran VI Terlaksananya pengujian mutu, pengawasan pengolahan hasil perikanan dan sertifikasi mutu yang sudah terakreditasi SNI, ISO/IEC 17025. 2008 dan	Produk olahan ikan produksi unit pengolah ikan Kab. Pati masih banyak yang belum mempunyai sertifikat kelayakan pangan	Kurangnya kesadaran pelaku usaha pengolah hasil perikanan untuk membuat SKP	Koordinasi Dinas Kesehatan dan Dinas Kelautan dan Perikanan memfasilitasi pembuatan SKP kepada para pelaku usaha pengolah hasil perikanan

No	Sasaran Strategis Renstra K/L dan Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	memiliki analisis pengujian dan inspektur mutu yang memiliki standar kompetensi			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan terhadap Kebijakan Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan setiap kabupaten/kota untuk menyusun rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang Kabupaten Pati telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

RTRW Kabupaten Pati memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, arahan pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, serta ketentuan umum peraturan zonasi. Kebijakan pemanfaatan ruang meliputi arahan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

Sebagai landasan operasional dalam pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya proses perizinan diperlukan rencana tata ruang yang bersifat lebih rinci / detail terutama pada kawasan perkotaan dan strategis, serta kawasan yang diarahkan menjadi kawasan perkotaan, yaitu dalam bentuk rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Ada 9 kecamatan atau kawasan perkotaan di Kabupaten Pati yang telah disusun RDTR-nya. Namun beberapa diantaranya masih memerlukan revisi dan dilengkapi dengan peraturan zonasi. Selain rencana rinci tata ruang, diperlukan aturan turunan lainnya dari RTRW Kabupaten Pati berupa Peraturan Daerah

tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sesuai amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RTRW Kabupaten Pati telah diatur rencana sistem perwilayahan untuk memudahkan distribusi program pembangunan sesuai dengan karakter kawasan yang terbagi ke dalam 6 (enam) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagai berikut :

- a. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Pati meliputi : Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, dan Kecamatan Gabus;
- b. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Trangkil meliputi : Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Margoyoso;
- c. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Tayu meliputi : Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gunungwungkal , dan Kecamatan Dukuhseti;
- d. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Juwana meliputi : Kecamatan Juwana, Kecamatan Wedarijaksa, dan Kecamatan Batangan;
- e. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) V dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Jakenan meliputi : Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Pucakwangi; dan
- f. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VI dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Kayen meliputi : Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambakromo.

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati wajib memedomani aturan pemanfaatan ruang kaitannya dengan aktivitas pengembangan di bidang kelautan dan perikanan. Perencanaan pembangunan dalam rangka pengembangan

produksi kelautan dan perikanan perlu memahami tentang struktur ruang dan pola ruang yang telah diatur. Struktur ruang dalam penerapan kebijakan sektor kelautan perikanan erat kaitannya dengan konektivitas antar wilayah sebagai prasyarat untuk kemudahan mobilitas dan distribusi/penyaluran hasil produksi.

Program terkait dengan RTRW salah satunya adalah Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut yang salah satu kegiatannya ada penanaman mangrove. Ketentuan untuk kawasan mangrove menurut RTRW berisi:

- (1) Pengembangan kawasan pantai berhutan bakau di sepanjang pesisir pantai meliputi:
 - a. Kecamatan Dukuhseti dengan luas kurang lebih 45 Ha (empat puluh lima hektar);
 - b. Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 45 Ha (empat puluh lima hektar);
 - c. Kecamatan Margoyoso dengan luas kurang lebih 34 Ha (tiga puluh empat hektar);
 - d. Kecamatan Trangkil dengan luas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh hektar);
 - e. Kecamatan Wedarijaksa dengan luas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh hektar).
 - f. Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 54 Ha (lima puluh empat hektar); dan
 - g. Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 62 Ha (enam puluh dua hektar);

- (2) Arahan pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui :
 - a. pelarangan kegiatan yang tidak menunjang perlindungan terhadap flora dan fauna;
 - b. pemindahan secara bertahap dengan penggantian yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap kegiatan yang sudah ada, yang tidak menunjang perlindungan terhadap flora dan fauna; dan
 - c. penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan yang rawan terhadap bahaya rob dan abrasi pantai.

Dalam perda RTRW diatur tentang Pengembangan sistem prasarana laut dimana pengembangan ini dilakukan melalui :

- a. pengembangan pelabuhan ikan dan fasilitas penambatan perahu nelayan untuk ukuran bobot sampai dengan 200 GT (dua ratus) gross ton;
- b. pengembangan pelabuhan niaga sebagai pendukung pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa di Kecamatan Juwana; dan
- c. pengembangan pelabuhan khusus sebagai pendukung pengembangan kegiatan industri di Kecamatan Batangan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam 5 tahun ke depan berencana membangun kolam pelabuhan yang lokasinya berada di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana. Kawasan ini nantinya akan dijadikan sebagai sentra industri perikanan tangkap.

Program Pengembangan Budidaya juga diatur dalam perda RTRW antara lain :

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan terdiri atas :
 - a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budidaya tambak;
 - c. perikanan budidaya air tawar; dan
 - d. pengolahan ikan.
- (2) Rencana pengembangan perikanan tangkap dilakukan melalui :
 - a. kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan area tangkapan antara 0-3 mil (nol sampai dengan tiga mil) dari pantai;
 - b. kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan area tangkapan antara 3-6 mil (tiga sampai dengan enam mil) dari garis pantai; dan
 - c. kawasan penangkapan ikan skala besar/industri dengan area tangkapan lebih dari 6 mil (enam mil) garis pantai.
- (3) Rencana pengembangan perikanan budidaya tambak meliputi :
 - a. Kecamatan Dukuhseti dengan luas kurang lebih 1.317 Ha (seribu tiga ratus tujuh belas hektar);

- b. Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 818 Ha (delapan ratus delapan belas hektar);
- c. Kecamatan Margoyoso dengan luas kurang lebih 1.455 Ha (seribu empat ratus lima puluh lima hektar);
- d. Kecamatan Trangkil dengan luas kurang lebih 1.167 Ha (seribu seratus enam puluh tujuh);
- e. Kecamatan Wedarijaksa dengan luas kurang lebih 769 Ha (tujuh ratus enam puluh sembilan hektar);
- f. Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 3.087 Ha (tiga ribu delapan puluh tujuh hektar); dan
- g. Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 1.993 Ha (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga hektar).

Untuk pengembangan budidaya perikanan fokus utama Dinas Kelautan dan perikanan adalah menjadikan Kecamatan Tayu sebagai sentra budidaya ikan nila salin. Ikan nila salin merupakan jenis ikan unggul yang dihasilkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Disebut nila salin, karena nila jenis ini tahan hidup pada air salinitas tinggi hingga 20 promil sehingga ikan ini layak dibudidayakan di tambak.

- (4) Rencana pengembangan perikanan budidaya air tawar meliputi:
 - a. Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 23 Ha (dua puluh tiga hektar);
 - b. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 170 Ha (seratus tujuh puluh hektar);
 - c. Kecamatan Gabus dengan luas kurang lebih 33 Ha (tiga puluh tiga hektar);
 - d. Kecamatan Margorejo dengan luas kurang lebih 45 Ha (empat puluh lima hektar); dan
 - e. Kecamatan Pati dengan luas kurang lebih 23 Ha (dua puluh tiga hektar).
- (5) Rencana pengembangan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Kecamatan Dukuhseti;
 - b. Kecamatan Tayu;

- c. Kecamatan Juwana; dan
 - d. Kecamatan Batangan.
- (6) Untuk mengembangkan kegiatan perikanan, Pemerintah Daerah akan mendorong dan atau memfasilitasi pengembangan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan yang berbasis sistem kewilayahan melalui pendekatan pembangunan minapolitan

2. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Mengacu pada isu daerah di bidang ekonomi sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, pengembangan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kelestarian lingkungan (*green economy*). Upaya untuk mewujudkan itu dapat dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang dilandaskan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga dalam prakteknya ke depan, setiap aktivitas ekonomi oleh masyarakat dalam skala usaha apapun (besar, menengah, kecil maupun mikro atau rumah tangga) harus senantiasa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam kaitannya dengan KLHS program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang langsung bersinggungan dengan lingkungan yaitu Program Perikanan Tangkap dengan indikasi kegiatan Pembangunan TPI, Pemeliharaan TPI, Pembangunan Kolam Pelabuhan/ Tempat Tambat Kapal Nelayan, Pembangunan Turap Dermaga. Pembangunan dimaksudkan sebagai salah satu solusi pengendalian banjir dan upaya memperlancar lalu lintas kapal. Pembangunan di lokasi yang sesuai dengan kemampuan lahan dan tidak mengakibatkan alih fungsi lahan, berpotensi menghasilkan limbah dan peningkatan eksploitasi air, perlu memperhatikan kerawanan bencana.

alternatif mitigasi yang dilakukan yaitu pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau

meningkatkan fungsi ekosistem, dengan uraian mitigasi sebagai berikut:

1. Menghindari kawasan pesisir yang rawan bencana (sedimentasi dan abrasi)
2. Pengaturan mobilisasi alat dan bahan pembangunan sarpras pendukung TPI, kolam pelabuhan, dan turap dermaga
3. Perlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sarana pendukung dermaga TPI
4. Reboisasi sekeliling prasarana dan sarana pendukung dermaga TPI

Rekomendasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan kajian KLHS adalah Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan utama Pembangunan Kolam dan Turap Dermaga yang dilakukan terlebih dahulu yaitu kegiatan sosialisasi kepada masyarakat (nelayan), yang disertai dengan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara Terpadu (TPST), tempat pembuangan limbah ikan, melakukan sosialisasi/ pembinaan kepada masyarakat/ nelayan harus menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Sebagai langkah untuk konkrit melaksanakan hasil dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kurun waktu 5 tahun mendatang Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan sosialisasi pembangunan TPI dan Kolam Pelabuhan, rehabilitasi dan penanaman mangrove serta fasilitasi dan pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.

3.5 Isu-Isu Strategis Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Berikut review atas beberapa permasalahan terkait faktor-faktor pendorong maupun penghambat terhadap pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dari sudut pandang gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah kementerian/lembaga terkait, sasaran jangka menengah OPD provinsi terkait, implikasi RTRW bagi pelayanan OPD dan implikasi KLHS bagi pelayanan OPD.

Tabel 3.4
Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Review Aspek	Uraian	Isu-isu
Gambaran pelayanan OPD	- Kualitas dan kuantitas produksi di sektor kelautan dan perikanan belum optimal	- Isu Peningkatan produktivitas komoditas kelautan dan perikanan yang kurang optimal
Sasaran jangka menengah kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan terbilang masih rendah - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Kelautan dan Perikanan - Masih belum optimalnya produksi sektor kelautan dan perikanan - Tingkat konsumsi makan ikan Kabupaten Pati terbilang rendah dilihat dari skala nasional - Produk olahan ikan produksi unit pengolah ikan Kab. Pati masih banyak yang belum mempunyai sertifikat kelayakan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Isu Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang lamban - Isu Kualitas dan kuantitas SDM Kelautan dan Perikanan yang kurang memadai - Isu Angka Konsumsi Makan Ikan kabupaten pati masih rendah - Isu Minimnya penjaminan mutu produk olahan pangan
Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan yang rawan terhadap bahaya rob dan abrasi pantai - Rencana pengembangan budidaya tambak di wilayah 7 Kecamatan Pesisir - Pengembangan pelabuhan niaga sebagai pendukung pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa di Kecamatan Juwana 	<ul style="list-style-type: none"> - Isu kurangnya luasan eksisting mangrove pada kawasan rawan abrasi - Isu penetapan Kecamatan Tayu sebagai sentra pembudidayaan ikan nila salin - Isu pengembangan kolam pelabuhan sebagai sentra industry perikanan tangkap
Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD	Pembangunan TPI, Kolam Pelabuhan dan turap dermaga berpotensi menghasilkan limbah dan peningkatan eksploitasi air, perlu memperhatikan kerawanan	- Isu Pembangunan insfrastuktur sektor kelautan dan perikanan yang tidak ramah lingkungan

Review Aspek	Uraian	Isu-isu
	bencana	

Dari hasil review terhadap beberapa tinjauan aspek serta mengacu pada arus utama isu-isu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pati beserta lingkungan eksternal yang mempengaruhinya, maka diperoleh isu-isu strategis yang memiliki dampak terhadap keberhasilan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Isu Peningkatan produktivitas komoditas kelautan dan perikanan yang kurang optimal;
2. Isu Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang lamban;
3. Isu Kualitas dan kuantitas SDM Kelautan dan Perikanan yang kurang memadai;
4. Isu Angka Konsumsi Makan Ikan kabupaten pati masih rendah;
5. Isu Minimnya penjaminan mutu produk olahan pangan;
6. Isu kurangnya luasan eksisting mangrove pada kawasan rawan abrasi;
7. Isu penetapan Kecamatan Tayu sebagai sentra pembudidayaan ikan nila salin;
8. Isu pengembangan kolam pelabuhan sebagai sentra industry perikanan tangkap;
9. Isu Pembangunan insfrastuktur sektor kelautan dan perikanan yang tidak ramah lingkungan.